

**KEBIJAKAN INDONESIA MENGENAI TINDAKAN PENGAMANAN
(SAFEGUARD) ATAS IMPOR UBIN KERAMIK BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 119 TAHUN 2018 DAN
GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE**

Nama: Ovina Viviani Bambang Siswanto
Jurusan/Program Studi: Hukum/Ilmu Hukum

Pembimbing:

1. Suhariwanto, S.H., M.Hum.
2. Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., L.LM., L.LM.

ABSTRAK

Prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) merupakan prinsip sentral dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT 1994). Sebagai negara anggota WTO, Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan yang ada dalam GATT 1994. Pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan bea masuk tindakan pengamanan berdasarkan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia. Dalam hasil penyelidikan tersebut terbukti telah terjadi lonjakan impor dan ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri. Penerapan kebijakan bea masuk tindakan pengamanan tidak sejalan dengan prinsip MFN namun GATT 1994 mengakui beberapa pengecualian terhadap prinsip MFN. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah bea masuk tindakan pengamanan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia konsisten dengan GATT 1994. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif berdasarkan peraturan-peraturan hukum, yaitu dengan meninjau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Ubin Keramik dengan GATT 1994.

Kata kunci: Tindakan Pengamanan; *Most Favoured Nation*; Kebijakan Pemerintah Indonesia.

**INDONESIA POLICY CONCERNING SAFEGUARD MEASURE ON
CERAMIC TILE IMPORTS BASED ON REGULATION OF THE MINISTER
OF FINANCE NUMBER 119 OF 2018 AND GENERAL AGREEMENT ON
TARIFFS AND TRADE**

Name: Ovina Viviani Bambang Siswanto

Majors/Programs of Study: Law/Legal Studies

Advisor:

1. Suhariwanto, S.H., M.Hum.
2. Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., L.LM., L.LM.

ABSTRACT

The Most Favored Nation (MFN) principle is a central principle in General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1994). As a member of the WTO, Indonesia has an obligation to comply with the provisions contained in the GATT 1994. In 2018, the Government of Indonesia issued an import duty security policy based on the results of the investigation of the Indonesian Trade Security Committee. In the results of the investigation, it's proved that there have been a surge in imports and the threat of serious injuries to the domestic industry. The adoption of the import duty security policy is not in line with the MFN principle but the 1994 GATT recognizes some exceptions to the MFN principle. This writing aims to determine whether the import duty of security measures issued by the Government of Indonesia is consistent with GATT 1994. This study was conducted using a normative juridical method based on legal regulations, namely by reviewing Minister of Finance Regulation No. 119 of 2018 concerning Imposition of Import Duty on Safeguard Measures Against Import of Ceramic Tiles with GATT 1994.

Keywords: *Safeguard; Most Favoured Nation; Indonesian Government Policy.*